



**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PERINGATAN HUT KE-67 MPR/DPR-RI
DAN LAPORAN KINERJA DPR-RI
TAHUN SIDANG 2011-2012**

RABU, 29 AGUSTUS 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PERINGATAN HUT KE-67 MPR/DPR-RI
DAN LAPORAN KINERJA DPR-RI
TAHUN SIDANG 2011-2012**

RABU, 29 AGUSTUS 2012

**Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,**

Yang terhormat,

- **Ketua dan Wakil-Wakil Ketua MPR-RI;**
- **Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPD-RI;**
- **Wakil-Wakil Ketua DPR-RI;**
- **Bapak Akbar tandjung Ketua DPR-RI Periode 1999-2004;**
- **Bapak Soetedjo, Wakil Ketua DPR-RI Periode 1992-1997;**
- **Bapak AM. Fatwa, Wakil Ketua DPR-RI Periode 1999-2004;**
- **Para Anggota DPR-RI;**
- **Sekretaris Jenderal MPR, DPR, DPD RI, dan jajarannya,**
- **Para Undangan yang kami muliakan,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bertemu kembali dalam Sidang Paripurna DPR-RI dalam rangka memperingati Ulang Tahun MPR/DPR-RI ke-67. Kelahiran lembaga wakil rakyat yang senantiasa kita peringati setiap tahun, memberikan makna, bahwa kita yang telah duduk sebagai wakil-wakil rakyat terpilih melalui proses Pemilu, memiliki tanggungjawab mengemban amanat rakyat, menjaga lembaga ini tetap eksis di dalam dinamika kehidupan bernegara.

Peringatan 67 tahun MPR /DPR-RI, beberapa hari setelah peringatan ke-67 Kemerdekaan RI, memberikan gambaran keteguhan kita bersama terhadap perlunya dilakukan secara terus-menerus peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga dalam perjalanan 3 (tiga) tahun kita mengabdikan bagi bangsa dan negara, sejak dilantik 1 Oktober 2009.

Sebelum kami melanjutkan Pidato Hari Ulang Tahun MPR/DPR-RI, masih dalam suasana Idul Fitri, izinkanlah atas nama Pimpinan DPR-RI, kami menyampaikan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1433 H, *minal 'aidin wal faidzin*, mohon maaf lahir dan bathin. Kiranya di hari yang fitri ini kita jadikan momentum kebersamaan kita, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada para pemimpin dan pengelola negeri ini, termasuk para anggota Dewan, agar dapat membawa negeri ini menuju negeri yang *baladatan thoyyibatun warabbun ghofur*.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam kurun waktu 67 tahun sejak terbentuk Lembaga Perwakilan Rakyat secara formal di Indonesia, 29 Agustus 1945, proses demokrasi yang berjalan di Indonesia terus berkembang secara dinamis. Pada usia yang mendekati tujuh dasawarsa, sudah menjadi kewajiban kita sebagai wakil rakyat, untuk berjuang melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

Di dalam Pidato HUT tahun ini, kami sekaligus akan melaporkan Kinerja DPR-RI dalam kurun waktu satu tahun, Agustus 2011 sampai Agustus 2012, yang bertema: **Respons DPR-RI Terhadap Tuntutan Masyarakat**. Tema ini sejalan dengan visi DPR-RI yang telah ditetapkan melalui Renstra DPR-RI 2010-2014, yaitu: "terwujudnya DPR-RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur". Sebuah visi yang memang sangat tepat, menjadi cita-cita dan keinginan kita bersama.

Namun, sebelum saya menyampaikan tentang kiprah dan kinerja DPR dalam kurun waktu satu tahun, ada baiknya saya mengajak anggota Dewan dan para hadirin, untuk mengenal secara sepintas tentang sejarah perjalanan Parlemen RI sejak tahun 1945 sampai saat ini. Pengenalan ini perlu, agar kita tetap memegang komitmen terhadap kewajiban kita sebagai wakil rakyat, kepada seluruh rakyat dan bangsa, serta tetap sadar akan semangat yang mendasari lahirnya parlemen di negara ini, dengan segala perjuangannya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat diawali dengan dibentuknya Dewan Rakyat sebagai bagian dari kebijakan politik etis Belanda. Pada pendudukan Jepang, juga dibentuk badan perwakilan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini selanjutnya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

DPR-RI periode 2009-2014 adalah periode DPR yang ke-18. Lembaga perwakilan rakyat yang terbentuk beberapa hari setelah kemerdekaan, berlangsung dalam berbagai bentuk seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), DPR dan Senat RIS, DPRS RIS, DPR Pemilu I, DPR Transisi, DPR Gotong Royong, DPR-GR minus PKI, DPR era Orde Baru melalui proses Pemilu setiap lima tahun, dan DPR Reformasi sejak tahun 1999.

Dengan demikian, pada intinya perjalanan sejarah parlemen dapat kita bagi ke dalam 3 (tiga) fase. **Fase pertama** berlangsung setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan dinamika demokrasinya yang tinggi, sesuai tata kehidupan bernegara pada periode tersebut. Awalnya, lembaga perwakilan rakyat terbentuk atas dasar Aturan Peralihan pasal IV UUD 1945 yang berbunyi: "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional". Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno. Tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi lembaga perwakilan Indonesia.

Fase kedua adalah fase Orde Baru yang dimulai pada Pemilu 1971. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat pada era ini tidak menunjukkan jatidiri yang sebenarnya sebagai lembaga perwakilan rakyat, karena besarnya kekuasaan Pemerintah, sehingga orang menyebut sebagai lembaga *rubber stamp* terhadap pemerintah.

Orde Baru tumbang bersamaan dengan lahirnya era reformasi pada 1999. Maka dibentuklah DPR-Reformasi, ini merupakan **fase ketiga**, dimulai periode tahun 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 dimana kita duduk di dalamnya sebagai anggota.

Dalam DPR periode reformasi, proses demokratisasi makin berkembang dengan adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan transparansi, yang memungkinkan warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan bahkan unjuk rasa secara terbuka. DPR dikatakan sebagai wakil rakyat yang mengemban fungsi-fungsi utama di bidang legislasi, di bidang anggaran dan di bidang pengawasan, menjalankan tugas dalam kerangka representasi rakyat.

Empat kali perubahan (amandemen) UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, telah berpengaruh terhadap bangunan struktur kenegaraan. Penyempurnaan atas bangunan struktur kenegaraan di era reformasi mengarah kepada terciptanya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara, khususnya antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Melalui perubahan UUD 1945, DPR lebih diberdayakan dengan diberikan kekuasaan membentuk UU, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1): "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

Perubahan yang menonjol lainnya, melalui perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), sebagai lembaga perwakilan yang baru di dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia. DPD-RI terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui Pemilu. Kehadiran DPD-RI juga diperkuat dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan sudah tiga tahun berturut-turut telah dilakukan Sidang Bersama DPR dan DPD-RI, yang menggambarkan adanya kebersamaan tiga institusi negara dalam satu forum di dalam membangun demokrasi, yaitu DPR-RI sebagai wakil rakyat, DPD-RI sebagai wakil daerah, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dengan amandemen UUD 1945, DPR selain memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, diberikan beberapa hak yang diatur secara jelas dalam amandemen kedua UUD 1945, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, bahkan diberikan kewenangan untuk menetapkan pejabat-pejabat publik.

Kewenangan-kewenangan yang besar inilah yang dikritisi masyarakat, karena masyarakat menuntut agar pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dilakukan secara benar dan optimal.

Terwujudnya DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang kredibel dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya, merupakan cita-cita dan keinginan kita bersama. Oleh karena itu, semua kritik harus dapat kita jawab, tidak hanya dalam bentuk argumentasi pembenaran, tetapi dengan

langkah-langkah nyata. Di dalam kesempatan HUT MPR/DPR-RI ini, marilah kita melakukan introspeksi, refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan lembaga perwakilan, agar dapat memastikan arah yang benar sebagaimana tuntutan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam rangka HUT MPR/DPR-RI inilah, ijin saya untuk menyampaikan laporan kinerja DPR selama satu tahun, Agustus 2011-Agustus 2012, dalam mengemban tiga fungsi utama DPR dan fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Laporan Kinerja dalam bentuk *executive summary* dibagikan kepada para anggota Dewan. Adapun intisari dari laporan kinerja yang telah dibahas melalui pertemuan konsultasi pimpinan DPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, intinya adalah sebagai berikut;

- **Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Perubahan UUD 1945 telah mengayunkan pendulum kekuasaan membentuk UU dari Presiden kepada DPR. Dengan kekuasaan ini, berarti DPR siap untuk melakukan fungsi perundang-undangan lebih optimal, karena dengan kekuasaan ini berarti berimplikasi pada perlunya peningkatan kapabilitas DPR dalam menyusun, merancang, menyiapkan naskah akademik, dan membahasnya bersama Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR, harus dilihat sebagai rangkaian keseluruhan proses atau tahapan pembentukan UU, mulai dari tahapan perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas); penyusunan RUU;

pembahasan RUU; persetujuan RUU menjadi UU; pengesahan dan pengundangan oleh Presiden.

Kegiatan penyusunan RUU dilakukan oleh Badan Legislasi maupun Komisi-Komisi berdasarkan Prolegnas. Dalam penyusunan RUU termasuk tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi. Sehingga kinerja legislasi DPR semestinya, bukan hanya dilihat dari RUU yang telah disahkan menjadi UU, melainkan juga perlu dilihat dari RUU yang sedang disusun dan sedang dibahas. Pada satu tahun sidang ini, sedang disusun 23 (duapuluh tiga) RUU, yang tersebar diberbagai Komisi dan Badan Legislasi, dan 53 (limapuluh tiga) RUU sedang dalam proses pembahasan.

Pada Masa Persidangan I, II, III dan IV Tahun Sidang 2011—2012, atas dasar Prolegnas 2011, DPR dan Pemerintah dapat menyelesaikan 26 (duapuluh enam) RUU, baik RUU Prioritas yang datang dari DPR dan Pemerintah, maupun RUU Kumulatif Terbuka, yaitu RUU yang berkaitan dengan APBN dan Pengesahan Konvensi.

RUU yang telah selesai dibahas di DPR RI mencerminkan cakupan di segala bidang pembangunan, antara lain:

- a. Di bidang politik, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Penyelenggara Pemilu dan RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Di bidang hukum, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Komisi Yudisial, dan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- c. Di bidang pertahanan dan keamanan, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Intelijen Negara, dan RUU tentang Persetujuan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir; RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme;
- d. Di bidang Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata;
- e. Di bidang keuangan, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- f. Di bidang pendidikan, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Pendidikan Tinggi;
- g. Di bidang keagamaan, telah dibahas dan disetujui RUU tentang Pengelolaan Zakat;
- h. Di bidang ketenagakerjaan, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
- i. Di bidang sosial, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Penanganan Konflik Sosial; RUU tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS); RUU tentang Rumah Susun, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Cacat;
- j. Di bidang pertanahan, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan;

k. Di bidang perhubungan, telah selesai dibahas dan disetujui RUU tentang Pelayaran;

Cakupan ruang lingkup atau materi RUU yang telah selesai dibahas tersebut, menunjukkan bahwa DPR memperhatikan seluruh aspek pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua alat kelengkapan Dewan telah melaksanakan fungsi legislasinya.

Sebenarnya, pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya dilihat dari jumlah/produk RUU yang dihasilkan, tetapi harus dilihat dari cakupan materi serta kepentingan rakyat dan negara yang dihasilkan dari UU tersebut.

DPR telah menunjukkan kerja keras dan konsentrasi tinggi dalam penyelesaian berbagai RUU, namun memang masih banyak kendala, diantaranya berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam terhadap suatu substansi, baik antara DPR dan pemerintah maupun diantara Fraksi-Fraksi DPR. Dalam kaitan ini, Dewan meminta perhatian Presiden/pemerintah untuk meminimalisir hambatan. Juga pimpinan meminta perhatian kepada fraksi dan anggota DPR, agar efektifitas penyelesaian RUU dapat dioptimalkan.

Rapat Pariputna Dewan Yang Terhormat,

Ada beberapa undang-undang yang telah disahkan, kini sedang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. DPR memandang bahwa adanya UU yang diuji materikan tersebut, bukan merupakan satu-satunya ukuran terhadap kualitas UU. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah menghadirkan lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD NRI

tahun 1945. Dalam setiap pembahasan RUU, DPR selalu mempertimbangkan konstitusionalitas setiap rumusan antara lain melalui kajian-kajian dengan mendengarkan pendapat ahli konstitusi maupun pelaku perubahan UUD NRI tahun 1945 untuk mendapat *original intent*.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua kepentingan dapat diakomodir dalam UU, terlebih apabila kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan, sehingga terdapat kecenderungan untuk menguji konstitusionalitas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam negara demokrasi, hal tersebut wajar dan menjadi salah satu wujud mekanisme *cheks and balances*.

- **Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Tugas konstitusional yang dilakukan oleh DPR dibidang anggaran, tidak hanya dalam konteks tanggungjawab sebagai lembaga perwakilan, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan rencana dan kebijakan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam kaitan ini, kita semua memiliki tanggungjawab untuk turut menentukan arah pembangunan nasional, termasuk arah kebijakan fiskal yang ditetapkan setiap tahun melalui proses penyusunan dan penetapan APBN. Tanggungjawab tersebut, dilakukan dalam konteks politik anggaran DPR dalam penyusunan maupun penetapan APBN.

Pelaksanaan politik anggaran DPR tidak dimaksudkan untuk mengedepankan hak budget DPR semata, tetapi merupakan tanggungjawab dalam mengaktualisasikan berbagai aspirasi masyarakat dan respons terhadap tuntutan masyarakat. Aktualisasi dan respons terhadap tuntutan masyarakat direalisasikan dalam wujud konkrit pembangunan nasional yang

benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, politik anggaran telah turut memberikan warna terhadap bentuk dan wujud konkrit pembangunan nasional setiap tahun melalui penetapan APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui besaran angka, dan berbagai program, serta kegiatan pembangunan setiap tahun. Dalam APBN Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui DPR, selain ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang antara lain melalui kebijakan subsidi, juga adanya peningkatan anggaran belanja modal yang sangat *urgent* untuk menggerakkan roda perekonomian.

Di samping itu, kebijakan fiskal dengan besaran pertumbuhan ekonomi yang disepakati, harus dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran.

Selama satu tahun sidang 2011-2012, DPR telah melaksanakan tugas anggaran melalui persetujuan terhadap APBN Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2012, melakukan penyusunan Rancangan APBN Tahun 2013 dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan APBN, serta pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.

DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang telah disampaikan Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2012 yang lalu.

Dalam pelaksanaan fungsi di bidang anggaran negara selama satu tahun sidang, DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi senantiasa berperan aktif

menyelesaikannya tepat waktu. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam proses pembahasan dan penetapan APBN, masih terdapat kekurangan yang sifatnya sangat teknis berkaitan dengan rencana agenda dan siklus pembahasan anggaran negara setiap tahun. Tetapi, secara keseluruhan DPR akan terus meningkatkan kinerja dengan tetap mengedepankan kewajiban dan tanggungjawab, merespons tuntutan masyarakat melalui proses perumusan dan penetapan kebijakan fiskal nasional.

- **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR berusaha untuk semaksimal mungkin mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi atau permasalahan dan keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat, dengan mengedepankan skala prioritas yang jelas dan bertanggungjawab. Pada pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPR melakukan Rapat-rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah, membahas masalah-masalah yang berkembang atau kasus-kasus yang muncul, untuk dibahas dan dicarikan solusi pemecahannya.

Tim Pengawas Century yang dibentuk Dewan telah melanjutkan tugasnya dalam satu tahun sidang ini, dengan mengadakan Rapat-rapat dengan penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meminta *progress report* atas tugas-tugas yang mereka jalankan.

Tim Pengawas mengharapkan, agar KPK melakukan langkah-langkah strategis yang mendukung penyelidikan tindak pidana korupsi pada Bank Century, sebagaimana yang diserahkan oleh Tim Pengawas dan BPK kepada KPK. Termasuk telah dilakukan Rapat dengan Menteri Keuangan, Bank Mutiara, LPS, dan Forum Nasabah Bank Century, dengan kesimpulan antara lain mendesak kepada lembaga tersebut untuk melakukan penyelesaian pembayaran nasabah Bank Century oleh Bank Mutiara, sesuai keputusan Mahkamah Agung. Rapat Tim Pengawas dengan Tim Pengembalian Aset, menyimpulkan bahwa Tim Pengawas mendorong Tim Pengembalian Aset untuk melakukan segala upaya agar aset yang dibekukan, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, segera dicairkan/dirampas untuk menutup kerugian negara.

Tim lain yaitu Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam tahun sidang ini hampir semua Alat Kelengkapan Dewan telah membentuk Panitia-Panitia Kerja (Panja) antara lain; Panja tentang Pencurian Pulsa, Panja Monitoring Pelaksanaan Pilkada 2012, Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara, Panja Perkeretaapian, Panja Privatisasi BUMN, Panja Garam, Panja Konsorsium Asuransi, Panja Minerba, Panja Jamkesmas, Panja Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Panja Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Panja Transfer Daerah, dan lain sebagainya.

Berbagai Panja yang telah dibentuk, berusaha untuk memberikan alternatif solusi, sekaligus meminta Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Kegiatan dan masukan yang diberikan oleh Panja, merupakan suatu amanah bagi DPR yang berwenang untuk mengartikulasi sekaligus mengagregasi kepentingan masyarakat Indonesia.

Bentuk lain pengawasan adalah kunjungan kerja Komisi dan kunjungan kerja bersifat spesifik. Kunjungan kerja spesifik antara lain, meninjau kondisi daerah tempat terjadinya kerusakan sosial, seperti yang terjadi di Ambon pada bulan Mei 2012, dimana hasil kunjungan ini menghasilkan rekomendasi yang diperlukan terkait proses pemulihan keamanan wilayah setempat dan masyarakat sekitarnya.

Dalam kaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, dalam tahun sidang 2011-2012, DPR melakukan telaahan hasil audit BPK-RI terhadap keuangan negara, khususnya APBN, yang dilaporkan kepada DPR-RI. Telaahan hasil audit, telah dilakukan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Selama tahun sidang ini, BAKN telah menelaah laporan-laporan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011 atas pengelolaan keuangan negara dan APBN.

Masih terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah aktif menghadiri sidang-sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden dengan DPR dan BPK, terkait dengan pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembelian saham tersebut harus melalui persetujuan DPR.

Pengawasan juga dilakukan untuk menjalankan keputusan DPR seperti penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011/1432 H. Pengawasan juga dilakukan pada keputusan-keputusan DPD-RI terkait tenaga kerja, keuangan daerah, dan beberapa aspirasi terkait pemekaran daerah.

DPR-RI juga menindaklanjuti pengawasan DPD-RI dalam konteks pemerintahan daerah, dan tugas-tugas lain DPD, dan diteruskan kepada Komisi-komisi terkait untuk ditindaklanjuti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selain melaksanakan tiga fungsi utamanya, DPR-RI juga telah melakukan penetapan pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU. Pada Tahun Sidang 2011–2012, DPR-RI telah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI, calon Anggota KPU, calon Anggota Bawaslu, calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Masyarakat, calon Pimpinan KPK dan Ketua KPK, calon Anggota LPSK, calon Ketua dan Anggota BPH Migas, calon Anggota BPK, calon Deputi Gubernur BI, calon Anggota Dewan Komisiner OJK, yang kesemua calon pejabat publik tersebut telah mendapatkan persetujuan DPR-RI dan telah dilantik oleh Presiden. Khusus untuk calon Hakim Agung, selain telah menyelesaikan proses pencalonan, Dewan masih menunggu kelengkapan pengajuan calon Hakim Agung berikutnya dari Komisi Yudisial.

Sementara itu, calon Anggota KPHI yang sudah diproses di DPR RI telah disampaikan kepada Presiden. Sedangkan calon Anggota KPPU dan calon anggota Komnas HAM, masih dalam tahap pembahasan di Komisi terkait.

Proses pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar RI untuk Negara Sahabat dan Dubes negara sahabat untuk RI, juga telah dilakukan DPR-RI.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Disamping terus mengupayakan pelaksanaan tugas konstitusionalnya melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPR-RI periode 2009–2014 pada Tahun Sidang 2011–2012 terus melanjutkan tekad dan komitmen untuk memperbaiki kinerjanya. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan yang ditujukan untuk pembenahan internal lembaga DPR-RI ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan masyarakat. Sasaran dari pembenahan internal Lembaga DPR-RI, adalah terwujudnya pelaksanaan tugas konstitusional yang lebih efektif dan efisien, dengan didukung oleh sistem pendukung yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan, guna mendorong kinerja DPR-RI yang lebih baik.

Adapun kegiatan pembenahan yang sedang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR yang efektif dan efisien, adalah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR-RI, menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR-RI, dan menyusun Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Tahun 2013 yang akan memberi ruang kepada setiap anggota untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif di daerah pemilihan, guna optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

DPR harus dapat mempertanggungjawabkan keterwakilannya, dengan memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai macam pengaduan atau aspirasi masyarakat dan konstituennya. Pada satu tahun sidang ini, pengaduan atau aspirasi masyarakat yang menonjol, yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah politik dan hukum, pertanahan/rumah/bangunan, aparatur negara/kepegawaian, pendidikan, dan perburuhan/tenaga kerja. Pengaduan disampaikan kepada Pimpinan Dewan/Pimpinan Komisi melalui surat, website, maupun melalui pesan singkat, yang jumlahnya relatif sangat banyak. Selama satu tahun telah diterima sekitar 4.465 surat, sekitar 706 email, dan lebih dari 42.000 pesan singkat.

Semua pengaduan diproses dengan menggunakan skala prioritas, ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja, dijawab kepada yang bersangkutan, dan bahkan sebagai bahan masukan kepada Komisi-Komisi pada saat melakukan kunjungan kerja atau kunjungan spesifik.

Selain itu, dalam satu tahun ini, DPR banyak menerima kunjungan langsung dari masyarakat terkait dengan masalah kedewanan. Tercatat sepanjang tahun 2011-2012, sejumlah 21.737 orang melakukan kunjungan ke Gedung DPR-RI untuk mendapatkan informasi yang terkait tentang kedewanan. Juga tercatat 720 delegasi masyarakat datang ke DPR membawa aspirasi mereka masing-masing.

Dalam rangka memasyarakatkan sistem kerja DPR sebagai lembaga negara dan memberikan pemahaman tentang bagaimana proses demokrasi dan proses politik bekerja di Indonesia, DPR menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja bagi para pelajar SMA/SMK se-Indonesia dan bagi para

mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia baik di kampus maupun di Gedung DPR-RI.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Peran DPR dalam pergaulan antar-bangsa, telah diupayakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun. Aktivitas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR-RI melalui BKSAP juga menjadi bagian dari catatan kinerja DPR-RI dalam Tahun Sidang 2011–2012. Aktivitas diplomasi parlemen tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antar-anggota parlemen dalam rangka kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR — Parlemen Negara-Negara Sahabat, peran serta secara aktif Anggota DPR-RI dalam sidang-sidang atau pertemuan-pertemuan internasional, terutama forum antarparlemen di tingkat kawasan dan global, dan juga melalui berbagai aktivitas Anggota DPR-RI dalam berbagai bentuk kaukus, seperti kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, kaukus parlemen Indonesia-Amerika, dan kaukus Antarparlemen ASEAN untuk Myanmar. Juga berbagai kegiatan Komisi I DPR-RI ke luar negeri.

Dalam rangka kegiatan GKSB DPR RI – Parlemen Negara-negara Sahabat, DPR-RI telah menerima sejumlah kunjungan Delegasi Parlemen Negara-negara Sahabat antara lain, dari Australia, Italia, Afghanistan, Pakistan, Palestina, Inggris, Yordania, Finlandia, dan Republik Korea. Sebaliknya, Delegasi GKSB DPR RI telah melakukan kunjungan ke Parlemen Negara-negara Sahabat, yakni ke Perancis, Jepang, Lebanon, China, Portugal, dan Kanada. Kegiatan saling kunjung tersebut telah dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk membahas peningkatan hubungan kerjasama kedua negara.

Partisipasi Anggota DPR-RI dalam sidang-sidang atau pertemuan-pertemuan internasional, terus dilakukan melalui forum-forum *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Parliamentary Union of the OIC Member Countries (PUIC)*, dan juga melalui pertemuan-pertemuan internasional lainnya.

Peran Ketua DPR-RI sebagai Presiden PUIC dan sebagai Presiden AIPA, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan diplomasi parlemen. Sebagai Presiden PUIC, Ketua DPR-RI telah melaksanakan tugas, memimpin Sidang *The Seventh of Parliamentary Union of the OIC Member Countries (PUIC) Conference and Related Meetings* pada tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2012 di Palembang, Sumatera Selatan. Sidang ke-7 Konferensi PUIC telah berjalan lancar dan sukses, serta telah menghasilkan 35 (tigapuluh lima) resolusi, 14 (empatbelas) diantaranya merupakan usulan Indonesia. Sidang PUIC Palembang juga menghasilkan Deklarasi Palembang dan Komunike Akhir (*Final Communiqué*). Dalam Sidang PUIC, juga telah dilaksanakan Konferensi Pertama Anggota-anggota Parlemen Perempuan Muslim PUIC.

Sebagai Presiden AIPA, Ketua DPR-RI telah melakukan kunjungan kerja ke-3 negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, dan Myanmar, dalam upaya memperkuat solidaritas AIPA dan meningkatkan peranserta AIPA di tingkat regional, khususnya pembentukan *ASEAN Community 2015*.

Sebagai Presiden AIPA, Ketua DPR-RI juga telah memimpin Delegasi AIPA berkunjung ke India, memenuhi undangan Ketua Parlemen India, guna membangun peluang kerja sama konkret antara AIPA dengan Parlemen

India, Lok Sabha. Di akhir masa kerja sebagai Presiden AIPA, sebelum serah terima jabatan pada Sidang Umum ke-33 AIPA September 2012 di Lombok, Ketua DPR-RI akan melakukan kunjungan ke Vietnam, Thailand dan Kamboja, dengan membawa misi yang sama, yakni menggalang kesepahaman visi yang lebih baik diantara Parlemen Anggota AIPA.

Masih dalam kerangka AIPA, DPR-RI telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang *Executive Committee AIPA* dan *The Ninth Meeting of AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (AIFOCOM)* pada pertengahan Juli di Yogyakarta, untuk mempersiapkan program dan agenda Sidang Umum ke-33 AIPA.

Dalam Sidang AIFOCOM, telah dihasilkan 2 (dua) draft resolusi, yaitu *Draft Resolution on the Role of Parliaments in Drug Demand and Supply Reduction and the Plan of Action to Combat the Drug Menace Consistent with the ASEAN Vision* dan *Draft Resolution on the Establishment of Technical Working Group (TWG) of AIFOCOM*, yang akan disampaikan dan diadopsi pada Sidang Umum ke-33 AIPA.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Salah satu alat kelengkapan DPR-RI yang peranannya perlu kita beri apresiasi adalah Badan Kehormatan DPR, yang tugas dan fungsinya adalah menegakkan Kode Etik DPR-RI. Langkah-langkah Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dan citra Dewan, disambut baik. Banyak keputusan yang cukup positif, terutama dalam hal penegakan disiplin para anggota DPR.

DPR-RI, atas usulan Badan Kehormatan, telah mensahkan Peraturan DPR tentang Kode Etik dan peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR. Dengan demikian, diharapkan badan ini lebih efektif dalam melakukan tugasnya, dalam rangka menegakkan etika, kedisiplinan, dan menjaga martabat Lembaga DPR.

Untuk menjadikan parlemen yang memiliki citra baik, tidak hanya dilakukan oleh Badan Kehormatan DPR-RI, tetapi yang penting adalah bagaimana setiap anggota DPR berusaha menegakkan citra dan meningkatkan kinerja, karena apapun yang kita lakukan, akan menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai terhadap wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam Pemilu Legislatif.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kegiatan pembenahan yang sedang dilakukan oleh BURT DPR-RI dimaksudkan untuk mewujudkan suatu Sistem Pendukung DPR yang profesional, adalah membentuk Badan Fungsional Keahlian (BFK) sebagai suatu sistem pendukung khusus yang akan memberikan dukungan keahlian bagi DPR-RI. Selain yang sedang dikerjakan, DPR-RI juga telah berhasil menyusun dan menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mendukung terwujudnya keberlangsungan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan sarana-prasarana yang mendukung kecepatan informasi DPR-RI, baik internal maupun eksternal, menyusun dan menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Perpustakaan DPR-RI, guna meningkatkan pelayanan bagi Anggota DPR RI

terkait dengan kebutuhan data, informasi dan referensi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

Upaya pemberian dukungan kepada kinerja DPR, telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui berbagai upaya strategis sehingga mendapatkan prestasi yang sangat baik, seperti meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2010, 2011, dan 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan. DPR terpilih menjadi model nasional keterbukaan informasi publik, menerapkan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), dan menyelenggarakan pengaduan masyarakat serta pelayanan informasi publik berbasis *online*.

Selain prestasi tersebut, tahun 2012 ini Setjen DPR-RI juga telah melakukan kegiatan Reformasi Birokrasi. Sebuah program untuk mendorong perubahan agar Setjen DPR-RI menjadi lebih profesional dan akuntabel.

Dalam upaya reformasi birokrasi, Setjen DPR-RI melakukan pembenahan internal yang terbagi dalam 8 (delapan) area perubahan, yaitu Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pada tahun 2012 Koperasi Pegawai Setjen DPR-RI telah ditetapkan sebagai Koperasi Terbaik urutan ke-5 dari 342 (tiga ratus empat puluh dua) Koperasi Primer Fungsional di wilayah DKI Jakarta.

Setjen DPR-RI diharapkan dapat memberikan dukungan secara optimal kepada DPR-RI untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam rangkaian pidato Peringatan HUT MPR/DPR-RI ke-67, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran pers, baik media cetak maupun elektronik yang telah memberikan kontribusi besar dalam mensosialisasikan peran dan fungsi DPR kepada masyarakat, serta turut melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR-RI. Kita berharap kerja sama antara Dewan dan insan pers, dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, terutama dalam memberikan informasi yang konstruktif dan proporsional kepada masyarakat.

Masih dalam rangkaian HUT MPR/DPR-RI ke-67, perlu diinformasikan bahwa, akan diselenggarakan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk pada hari Sabtu, 1 September 2012 pukul 19.30 WIB, dengan lakon: **Sumilaking Pedhut Wiratha (Menyingkirkan Kabut di Negara Wiratha)**, bersama Dalang Ki Manteb Sudarsono, bertempat di lapangan Bola DPR-RI. Dengan lakon ini, diharapkan, persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kedepan, dapat diatasi dengan optimisme. Juga akan dilakukan kegiatan sosial dalam bentuk donor darah bagi anggota DPR, karyawan DPR, MPR dan DPD-RI, pada hari ini Rabu, 29 Agustus 2012. Mohon partisipasinya.

Dalam rangkaian HUT akan ada pameran Foto dari jurnalis DPR bertempat di aula gedung DPR, dengan tema **Warna Warni Parlemen**, menggambarkan kegiatan DPR satu tahun.

Demikianlah Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Peringatan HUT MPR/DPR-RI ke-67 sekaligus menyampaikan Laporan Kinerja DPR-RI dalam kurun waktu satu tahun.

DIRGAHAYU MPR/DPR-RI

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Jakarta, 26 Agustus 2012

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. MARZUKI ALIE